

**DISEMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING MELALUI PENDEKATAN *HEALTH COMMUNICATION*
MODEL DI KABUPATEN ACEH BARAT**

Cut Nabilla Kesha^{1(a)}, Desi Maulida^{2(b)}, Maryam^{3(c)}, Safrida^{4(d)}

^{1,4}*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar*

²*Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar*

³*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh*

^{a)}*cutnabillakesha@utu.ac.id*, ^{b)}*desimaulida@utu.ac.id*, ^{c)}*maryam@unimal.ac.id*,

^{d)}*safrida1290@utu.ac.id*

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article History:

Dikirim:

22-04-2024

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Diseminasi Kebijakan,
Pencegahan Stunting, *Health
Communication Model*

Keywords:

*Policy Dissemination,
Stunting Prevention, Health
Communication Model*

Corresponding Author:

cutnabillakesha@utu.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Barat telah ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas. Pada tahun 2022 Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 610 anak menderita stunting yang tersebar di 11 kecamatan dari 12 kecamatan. Diantara penyebab tingginya stunting dikarenakan masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang mumpuni mengenai stunting, serta belum adanya regulasi secara spesifik yang mengatur tentang pencegahan stunting sebagai langkah preventif di tingkat kabupaten. Penelitian di lakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Bubon yang merupakan kecamatan terbanyak penderita stunting dari 10 kecamatan lainnya. Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan diseminasi dari implementasi kebijakan pencegahan stunting beserta langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan sudah berjalan maksimal. Adapun upaya strategis yang dilakukan dalam mencapai tujuan penurunan prevalensi stunting dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi target audiens, merumuskan pesan edukasi, pemanfaatan media informasi, strategi intervensi melalui program-program percepatan penurunan stunting, penentuan kelompok prioritas dan penggunaan metode pelaksanaan dengan melakukan koordinasi dengan para stakeholder.

ABSTRACT

West Aceh Regency has been designated as one of the focus locations for integrated stunting reduction interventions in 2022 based on the Decree of the Minister of National Development Planning/Bappenas. In 2022, West Aceh Regency recorded 610 children suffering from stunting spread across 11 of 12 sub-districts. Among the causes of high stunting is that the community is not provided with reliable information about stunting, and there are no specific regulations governing stunting prevention as a preventive measure at the district level. The research was conducted in two sub-districts, namely Johan Pahlawan Sub-district and Bubon Sub-district, which are the sub-districts with the most stunting sufferers out of 10 other sub-districts. This research aims to describe the dissemination of the implementation of stunting prevention policies along with the strategic steps taken in efforts to reduce stunting. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The results of the research show that policy implementation in an effort to reduce the

prevalence of stunting in West Aceh Regency can be said to have run optimally. The strategic efforts undertaken to achieve the goal of reducing stunting prevalence begin with identifying problems, identifying target audiences, formulating educational messages, utilizing information media, intervention strategies through programs to accelerate stunting reduction, determining priority groups and using implementation methods by coordinating with stakeholders.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.989>

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat khususnya anak-anak yang berusia kurang dari lima tahun akibat dari gizi buruk yang dialami oleh anak selama 1000 hari pertama kehidupan. Secara global, prevalensi stunting pada anak-anak sekitar 21,9% dan lebih dari setengahnya berada di Asia (UNICEF, 2012). Stunting mempengaruhi sekitar 149,2 juta anak di bawah usia 5 tahun usia (Isobel L. Gabain, et.al, 2022). Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia telah melakukan penguatan komitmen untuk mitigasi stunting dengan bergabung dalam Gerakan Global Scaling Up Nutrition (SUN) sebagai upaya yang dilakukan oleh beberapa negara untuk memperkuat komitmen pemenuhan gizi secara global untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak (Kementerian Kesehatan, 2018). Infeksi dan nutrisi yang tidak baik merupakan faktor risiko utama terjadinya stunting, sehingga intervensi yang meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan prenatal bagi bayi dapat mengurangi risiko stunting (Marni, et.al, 2021). Upaya penurunan prevalensi stunting saat ini juga menjadi fokus pembangunan nasional dan salah satu isu utama prioritas pemerintah Aceh. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2029 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh. Aturan tersebut menjadi panduan bagi kabupaten/kota dan stakeholders dalam melaksanakan intervensi gizi untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Dalam pelaksanaannya, setiap kabupaten/kota telah berupaya dengan berbagai program sebagai upaya preventif dalam mengatasi masalah stunting, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat sendiri, telah ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas (acehbaratkab.go.id, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas

Kesehatan Aceh Barat (2023), pada tahun 2022 Kabupaten Aceh barat tercatat sebanyak 610 anak menderita stunting yang tersebar di 11 kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Rincian untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penderita Stunting di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah (Anak)
1	Johan Pahlawan	179
2	Bubon	163
3	Samatiga	44
4	Arongan Lambalek	14
5	Woyla	51
6	Woyla Barat	27
7	Woyla Timur	20
8	Meurebo	49
9	Panton Rhe	14
10	Pante Cereumen	8
11	Sungai Mas	21
12	Kaway XVI	0
Jumlah		610

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Barat (2023)

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 sebesar 35.2 persen, mengalami peningkatan sebanyak 2% dari tahun 2021 yaitu sebesar 33,2 %. Sebagai upaya dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak seperti mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab layanan, sektor/lembaga non-pemerintah hingga masyarakat, hal tersebut dikarenakan stunting merupakan masalah yang kompleks, maka dibutuhkan koordinasi tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga dari non-kesehatan.

Menurut Pratiwi (2019), salah satu faktor yang menyebabkan besarnya persentase stunting di Indonesia dikarenakan masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang mumpuni

mengenai stunting. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa stunting hanya dapat ditandai dari kondisi fisik anak yang kurus dan pemenuhan pangan yang tidak cukup, padahal stunting juga mempengaruhi sisi kognitif anak dalam memahami sesuatu (Ernawati, 2022). Penanggulangan dari tingginya angka stunting tentu membutuhkan upaya kritis dan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah (Turnip, 2018).

Belum terealisasi regulasi terkait implementasi penanganan di setiap kabupaten diindikasikan menjadi salah satu faktor tidak efektifnya komunikasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan yang harus dilakukan. Pentingnya komunikasi dalam perubahan perilaku merupakan poin utama yang dapat digunakan untuk mencegah stunting. Sebagai wujud dari upaya strategis maka komunikasi kesehatan menjadi penting dilakukan dalam menyebarkan pesan kesehatan sehingga masyarakat dapat membuat keputusan mengenai pengelolaan kesehatan menjadi lebih baik (Liliweri, 2007). Sasaran komunikasi dapat dibagi menjadi kelompok prioritas, kelompok penting, dan kelompok pendukung (Ester, et.al, 2023).

Pembagian sasaran ini bertujuan agar komunikasi berlangsung dengan tepat sasaran yang memprioritaskan pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki peluang lebih besar terjadinya stunting. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk menjadi lebih sadar tentang isu kesehatan, resiko dan solusi dari masalah Kesehatan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya dalam mengkaji implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh barat dalam menurunkan prevalensi stunting. Hasil penelitian dikaji dengan menggunakan pendekatan model komunikasi kesehatan (*health communication*) model secara komprehensif sesuai dengan temuan di lapangan dengan tujuh indikator seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Model Komunikasi Kesehatan



Sumber: Bensley & Brookins-Fisher (2013)

Komunikasi kesehatan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang isu kesehatan, resiko kesehatan dan solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan (Mukti., et.al, 2022). Hal ini juga dapat mendorong komunikasi dalam hal ini masyarakat untuk berperilaku dalam mencapai kesejahteraan kesehatan (Achmad Bachruddin, et.al, 2022), sehingga penerima informasi/pesan dapat membuat suatu keputusan yang tepat dalam mengelola kesehatan (Liliweri, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, karena memerlukan analisis data mengenai daerah tertentu, turut pula meliputi kelompok individu hingga peristiwa khusus (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive* (pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu) (Silalahi, 2009), dan dipilih sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
3. Admin Elsimil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat
4. Petugas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Johan Pahlawan
5. Petugas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Bubon

6. Kader Posyandu Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan
7. Kader Posyandu Desa Layung Kecamatan Bubon
8. Orang tua penderita stunting di salah satu gampong di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Bubon (2 orang)

Analisis data dilakukan dengan empat tahapan, yaitu koleksi data (mengumpulkan data), reduksi data (dirangkum dan dipisahkan menurut fokus yang telah ditetapkan berupa informasi terpenting), penyajian data (menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian), dan verifikasi (penarikan kesimpulan), verifikasi dimaksudkan menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan secara terus menerus sepanjang proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diseminasi Kebijakan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Aceh Barat Melalui Pendekatan *Health Communication Model*

Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. dalam mewujudkan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat maka dibutuhkan strategi diseminasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat yang menjadi target sasaran memahami dan ikut terlibat dalam setiap program atau kegiatan untuk penurunan angka stunting.

Adapun upaya diseminasi kebijakan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh berdasarkan pendekatan *health communication model* dilakukan dengan beberapa strategi diseminasi, diantaranya:

Defining Problem

Defining problem yaitu proses untuk mengidentifikasi masalah. Adapun masalah yang dirumuskan adalah berdasarkan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat lebih jauh permasalahan kesehatan yang dihadapi, termasuk permasalahan stunting yang saat menjadi salah satu program prioritas pemerintah kabupaten Aceh Barat. Menurut Pratiwi (2019), salah satu faktor yang menyebabkan besarnya persentase stunting di Indonesia dikarenakan masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang mumpuni

mengenai stunting seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas Kesehatan, dalam wawancara disampaikan:

“... Tantangan kita saat ini lebih ke sikap masyarakat yang kurang aware terhadap kesehatan. Hal itu yang menyebabkan masyarakat seakan tidak mau mencari atau menerima informasi seputar kesehatan dengan baik. Maka dari itu, kita memang harus bekerja lebih intensif lagi, tidak mudah menyerah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya stunting yang tidak hanya berdampak pada keadaan fisik saja, namun juga dapat mempengaruhi sisi kognitif dari anak, dan itu perlu diwaspadai” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Identifikasi masalah berdasarkan pengamatan lapangan terkait dengan implementasi kebijakan serta faktor penyebab tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Aceh barat berdasarkan hasil wawancara dengan para informan didasari oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Urgensi dari aturan atau kebijakan tentang pencegahan stunting belum mampu diimplementasikan dengan baik oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah, petugas kesehatan, maupun masyarakat;
- b) Minimnya pengetahuan tentang stunting di kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya sejak dini dalam pencegahan dan penanganan stunting pada anak;
- c) Terjadinya kesalahan pola asuh terutama dalam asupan pemenuhan gizi anak oleh orang tua;
- d) Belum optimalnya program preventif yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak mampu mencapai target sesuai dengan yang diwacanakan.

Mengidentifikasi Target Audiens

Dalam upaya mendiseminasikan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah target audiens. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Fase ini berusaha untuk mengkategorisasikan target sasaran prioritas yang akan mendapatkan manfaat dari pemberian informasi kesehatan. Terkait dengan pentingnya menetapkan target

prioritas yang menjadi fokus program dan kegiatan pencegahan stunting, Anto yang merupakan Admin Elsimil Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyampaikan:

"... Ketika kita memberikan edukasi maupun sosialisasi kita tentu harus tau dulu kepada siapa informasi itu diberikan. Karena beda kelompok tentu beda cara, dan itu perlu kita sesuaikan. Maka dari itu, kita sudah mengkategorikan kelompok-kelompok tersebut menjadi lima sasaran, diantaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu balita, anak balita, dan keluarga balita. Ini bukan pekerjaan mudah, untuk itu butuh perhatian bersama dan sinergitas dari seluruh stakeholder sehingga percepatan penurunan stunting yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa dilaksanakan secara maksimal" (Wawancara, 22 Agustus 2023).

Selain dari kelompok prioritas, implementor juga perlu menetapkan lokasi berdasarkan letak geografis masyarakat yang memiliki penderita stunting lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat saat ini sebesar 27,4%. Pada tahun 2022, terdapat 24 gampong lokasi fokus (lokus) untuk percepatan penurunan stunting, dan selanjutnya ditetapkan sebanyak 40 gampong lokus pada tahun 2023 sesuai hasil analisis situasi dengan pertimbangan prevalensi, kasus stunting tertinggi dan faktor lainnya di masing-masing desa. Untuk rincian lokus pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

NO	KECAMATAN	GAMPONG	PERSENTASE PREVALENSI STUNTING (%)
1	BURON	COT LADA	23,00
2	JOHAN PAHLAWAN	PADANG SEURAHET	36,93
3	JOHAN PAHLAWAN	LAPANG	18,77
4	JOHAN PAHLAWAN	SUKA NEE	15,15
5	KAWAY XVI	PUCOK PUNGKIE	25,00
6	KAWAY XVI	ALUE PEUDEUNG	23,40
7	KAWAY XVI	ALUE ON	21,74
8	KAWAY XVI	TEULADAN	21,00
9	KAWAY XVI	PUTIM	19,33
10	KAWAY XVI	SIMPANG	15,38
11	KAWAY XVI	MESUD	15,25
12	PANTAI CEUREUMEN	LAWET	19,61
13	PANTON REU	BLANG BALEE	45,43
14	PANTON REU	SABAH KRUBUNG MANGGIE	40,00
15	PANTON REU	TAMPING	38,29
16	PANTON REU	MANGGIE	38,33
17	PANTON REU	KUALA MANYEU	36,09
18	PANTON REU	GURONG MATA IE	21,74
19	PANTON REU	COT MANGGIE	21,43
20	PANTON REU	BARO PAYA	17,86
21	PANTON REU	PAYA BARO MELUNG	17,39
22	PANTON REU	ANTONG	15,79
23	SAMATIGA	SANGGILER	40,00
24	WOYLA	BAKAT	37,76
25	WOYLA	ARON BARON	22,22
26	WOYLA	GRUMPA RAYA	22,22
27	WOYLA	JAWA	22,22
28	WOYLA	LUENG TOK YAH	22,22
29	WOYLA	PASI LUNAK	18,75
30	WOYLA	PANTON	16,67
31	WOYLA	PASI ARA KB	16,67
32	WOYLA BARAT	LEUBOK PASI ARA	33,33
33	WOYLA BARAT	PASI MALEK	29,17
34	WOYLA BARAT	ALUE PERMAN	24,00
35	WOYLA BARAT	ALUE LEUBOD	20,00
36	WOYLA BARAT	ALUE KULMUNENG	18,42
37	WOYLA BARAT	SIMPANG TEUMAROM	17,65
38	WOYLA TIMUR	TEUMKET RANOM	22,73
39	WOYLA TIMUR	BLANG DALAM	16,67
40	WOYLA TIMUR	PAYA MELGENDRANG	15,79

Sumber: Dinas Kesehatan (2023)

Dengan adanya penetapan lokus intervensi stunting di 40 desa, selanjutnya dapat menjadi prioritas target untuk memaksimalkan informasi yang berupa edukasi dan pendampingan sehingga program yang dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal dan mampu mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai dalam upaya menurunkan tingkat stunting pada anak. Kecamatan Johan Pahlawan yang menjadi salah satu lokus percepatan penurunan stunting juga mengupayakan langkah-langkah preventif untuk mengurangi jumlah penderita stunting untuk setiap desa yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan.

Intervention Strategy

Intervention strategy yaitu merancang upaya strategis yang dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi. Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang pencegahan dan Penanganan Stunting

Terintegrasi di Aceh, dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu, pemerintah kabupaten Aceh Barat telah melakukan beberapa upaya strategis yang mendukung tujuan tersebut seperti pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada desa yang menjadi lokus penanganan, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dashat) dan Rumah Gizi Gampong (RGG).

Program DASHAT yang diterapkan di Kabupaten Aceh Barat, merupakan program BKKBN RI yang dibina oleh BKKBN Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, dalam upaya mengatasi persoalan stunting di daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta baduta/balita stunting, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan memanfaatkan sumber daya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh petugas kesehatan puskesmas Bubon dalam wawancara ia menyampaikan:

“ . . . Program DASHAT yang digagas BKKBN itu, bisa menjadi langkah konkret dalam mempercepat penurunan stunting, yang menasar langsung kepada keluarga berisiko stunting, sekaligus mendorong masyarakat untuk bersama menunjukkan tanggung jawab sosial kepada keluarga yang berisiko tinggi stunting ” (wawancara, 31 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Anto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), ia menyampaikan:

“ . . . Program DASHAT ini diharapkan mampu memberikan edukasi serta memberdayakan masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang, baik bagi balita, ibu menyusui, ibu hamil dan keluarga berisiko stunting, utamanya dengan memanfaatkan sumber pangan lokal maupun sumber daya dari mitra lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap desa akan didampingi oleh ahli gizi, agar makanan

yang di olah benar-benar memenuhi gizi seimbang ” (wawancara, 22 Agustus 2023).

Selain program DASHAT, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kemenag Aceh Barat khususnya dengan melibatkan KUA Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin bersama tim pendamping keluarga yang telah dibentuk. Adapun program lain yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah bapak dan bunda asuh anak stunting yang merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah setempat dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting. program ini menjadi gerakan kolaboratif dalam mempercepat penurunan stunting yang menasar langsung kepada keluarga berisiko stunting, sekaligus mendorong masyarakat untuk menunjukkan tanggung jawab sosial kepada keluarga berisiko tinggi stunting tersebut.

Program-program tersebut merupakan upaya strategis yang dilakukan agar prevalensi stunting dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat secara akumulatif menurun. Penurunan penderita stunting tahun 2023 terhitung dari bulan januari sampai agustus secara keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh dari 13 puskesmas Kabupaten Aceh barat dapat dikatakan mengalami penurunan, sebagaimana yang terlihat pada data berikut:

Tabel 3. Jumlah Penderita Stunting Kabupaten Aceh Barat Januari-Agustus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STUNTING							
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	JOHAN PAHLAWAN	JOHAN PAHLAWAN	184	193	115	101	90	84	78	85
2	JOHAN PAHLAWAN	SUAK RIBEE	94	25	14	20	13	25	13	38
3	SAMATIGA	COT SEUMEREUNG	47	40	36	49	47	41	38	28
4	BUBON	KUTA PADANG	62	56	35	27	29	21	23	22
5	ARONGAN LAMBALEK	DRIEN RAMPAK	15	10	9	13	11	11	14	16
6	WOYLA	KUALA BHEE	45	45	14	14	11	11	15	0
7	WOYLA BARAT	PASIE MALI (WOYLA)	17	35	15	14	14	27	6	9
8	WOYLA TIMUR	TANGKEH	20	22	17	14	15	19	16	13
9	KAWAY XVI	PEUREUMEU	15	9	13	19	19	19	20	20
10	MEUREUBO	MEUREUBO	9	23	14	10	18	18	7	6
11	PANTAI CEUREMEN	PANTE CEUREMEN	9	9	11	11	10	9	8	7
12	PANTON REU	MENTULANG	67	43	48	30	31	31	29	17
13	SUNGAI MAS	KAJEUNG	44	27	45	0	0	1	10	2
JUMLAH			628	537	386	322	308	322	277	263

Sumber: Dinas Kesehatan (2023)

Message (Pesan)

Message yaitu pemilihan dan perumusan pesan atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan target audiens. Sebagai upaya

dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan kesehatan Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi langsung dan pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan kepada kader kesehatan dari setiap desa. Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap Puskesmas dengan memberikan sosialisasi berupa penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, sanitasi yang bersih, serta penyuluhan pola hidup bersih dan sehat serta penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan masyarakat. Dalam wawancara, Ibu Fitriani yang merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat menyampaikan:

“ . . . Sebanyak 18.041 keluarga berisiko di Kabupaten Aceh Barat, juga telah mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana, serta 20.407 keluarga berisiko juga telah mendapatkan pendampingan oleh tim pendamping keluarga dari total 21.182 keluarga berisiko ” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Perumusan pesan atau informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat dikemas dalam bentuk edukasi tentang pengenalan stunting serta upaya-upaya solutif yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan stunting. Pemberian informasi dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Environmental (Lingkungan)

Environmental (lingkungan), yaitu pemilihan lingkungan berkaitan dengan tempat dimana sasaran prioritas yang paling mudah dijangkau. Berdasarkan jumlah penderita stunting di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan menjadi salah satu Kawasan dengan jumlah penderita stunting paling banyak, yaitu mencapai 179 anak dari jumlah keseluruhan 610 anak. Terkait dengan jumlah penderita stunting di Kecamatan Johan Pahlawan, Yanti yang merupakan Petugas Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Johan Pahlawan dalam wawancara menyampaikan:

“ . . . kalau di kecamatan Johan Pahlawan itu sendiri untuk angka stunting jumlahnya banyak. Tapi kalau dilihat dari persentase jumlah keseluruhan balita dengan penderita stunting kita bukan yang paling tinggi persentase penderitanya. Karena memang

jumlah anaknya sehingga penderitanya juga banyak. Kalau di kecamatan lain kenapa lebih sedikit karena memang jumlah anaknya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kecamatan johan pahlawan. Karena jumlahnya yang banyak, jadi memang tidak tercover semua. Keterbatasan anggaran juga menjadi alasan, sehingga kita menetapkan sebanyak 70 anak dan 20 ibu hamil KEK yang menjadi prioritas pendampingan kita ” (wawancara, 28 Agustus 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi fokus pendampingan dan penanganan stunting dipilih berdasarkan tingkat kronisitas dari penderita. Hal ini bertujuan untuk memberikan penanganan secara terpadu kepada target penderita sehingga pemulihan dan masalah kesehatan lainnya dapat teratasi dengan maksimal.

Channel (Saluran)

Channel (saluran), yaitu pemilihan saluran atau media yang digunakan sehingga menjangkau target audiens secara masif dan menyeluruh. Dalam upaya diseminasi kebijakan, maka dibutuhkan pemanfaatan media yang bersifat adaptif agar target kebijakan dapat dicapai dengan maksimal. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah penyampaian secara langsung melalui sosialisasi atau penyuluhan serta dengan memanfaatkan media seperti radio yang dikemas dalam bentuk talkshow. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dengan jumlah pendengar yang lebih masif dibandingkan dengan penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Barat, dalam wawancara ia menyampaikan:

“ . . . Untuk saat ini kita sedang berupaya untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang stunting, baik dari pengenalan penyakit sampai dengan upaya penyembuhan yang dapat dilakukan. Kegiatan itu biasa dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan peran petugas kesehatan dari puskesmas dan para

kader dari desa-desa. Untuk penggunaan media saat ini kita biasanya menggunakan media radio, seperti talkshow. Kalau untuk media sosial masih belum gencar digunakan” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Metode (Metode)

Pemilihan metode komunikasi yang tepat untuk dalam rangka pemberian informasi kesehatan kepada audiens, seperti dengan pelatihan, sosialisasi, presentasi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam aksi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 yang di ikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab layanan, maupun sektor/lembaga non-pemerintah hingga masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pemerintah Pusat dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting nasional hingga di bawah 14 persen, pada tahun 2024 mendatang. Rembuk Stunting ini di hadiri oleh unsur Forkopimda Aceh Barat, para Kepala SKPK, para Camat, Ketua TP PKK Aceh Barat, Ketua IBI dan IDI Aceh Barat, para Kepala Puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, keuchik serta kader desa lokus di lingkup Kabupaten Aceh Barat.

Hal yang diharapkan dari terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai stakeholder nantinya dapat membantu pemerintah mencapai target penurunan prevalensi stunting. Dalam wawancara, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa:

“... Diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPK dengan seluruh elemen terkait dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Kalau penurunan kasus stunting itu memang 30 persen menjadi kewajiban Dinas Kesehatan, dan 70 persen menjadi kewajiban sejumlah dinas seperti PUPR, DLHK, dan intansi terkait lainnya di Aceh Barat” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Koordinasi yang baik tidak hanya memfokuskan kepada dinas-dinas terkait, namun juga dari petugas-petugas kesehatan

yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam implementasi program dan kegiatan pencegahan stunting. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ibu Fitriani dalam wawancara menyampaikan:

“... Harapannya kepada para kepala puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, para keuchik, kader desa lokus stunting serta seluruh elemen terkait lainnya, agar dapat melakukan penelusuran dan pendataan secara akurat terhadap bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting, sehingga mendapat perhatian intensif dan penanganan bersama” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Aceh Barat

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam percepatan dan penanganan stunting, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Minimnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Petugas Kesehatan

Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan mempunyai peran penting untuk pelaksana upaya kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menghadapi transisi epidemiologi yang akan memberikan tantangan dan isu startegis terhadap sumber daya manusia dalam bidang kesehatan. Padahal kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Nasional. Salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi faktor rendahnya kualitas SDM yaitu stunting. SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan pelayanan kesehatan.

Dalam implementasi program pencegahan stunting juga menghadapi kendala dari minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan bertanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. Minimnya sumber daya manusia dari segi kemampuan dan pengetahuan mendalam tentang indikasi stunting menjadikan beberapa program atau kegiatan pencegahan stunting tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut

seperti yang disampaikan oleh petugas kesehatan Layung Kecamatan Bubon dalam wawancara:

“... harus kita akui memang kadang kita menghadapi kendala dalam pelaksanaan program. Kendala itu tidak hanya dari luar tapi juga dari internal. Misalnya ada beberapa dari kita kemampuan untuk penyampaian saat edukasi masih tergolong minim, belum lagi ada persepsi yang berbeda terkait dengan indikator stunting, itu tentu menjadi problem kita. Maka dari itu, diperlukan pelatihan secara berkala tidak hanya kepada kader tapi juga kepada petugas kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas” (wawancara, 31 Agustus 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala bidang kesehatan masyarakat dinas kesehatan dalam wawancara yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa bidang di dinas kesehatan khususnya bidang kesehatan masyarakat yang posisinya kosong, tidak ada yang bekerja, sehingga pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh banyak bidang terpaksa dilakukan oleh satu orang. Hal ini tentu mengakibatkan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal.

Rendahnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan bahwa pengetahuan dan kesadaran untuk hidup sehat menjadi akar utama dari permasalahan stunting. Hal itu terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran untuk hidup sehat, hal itu dikarenakan minimnya pengetahuan kesehatan yang diterima masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat diantaranya adalah dengan memanfaatkan peran kader yang dibentuk oleh setiap desa sebagai fasilitator pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, mulai dari lingkungan yang bersih hingga asupan makanan yang bergizi terutama jika peruntukannya kepada balita. Selain dengan memaksimalkan peran kader kesehatan di setiap desa, pemerintah melalui dinas kesehatan dan BKKBN Kabupaten Aceh Barat

juga melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari setiap puskesmas.

Minimnya Intensitas Koordinasi dengan stakeholder

Adapun hal lain yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dari penurunan prevalensi stunting di Aceh barat disebabkan karena peran stakeholder yang belum optimal, hal itu ditandai dengan intensitas koordinasi dan Kerjasama secara kolektif yang masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program seakan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala bidang kesehatan masyarakat dalam wawancara:

“... sebenarnya yang menjadi PR besar kita bukan hanya bagaimana edukasi itu bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat, namun juga dari implementasinya yang seharusnya bisa berbarengan saling merangkul untuk mencapai tujuan itu. Saat ini yang kita lihat seperti adanya tarik ulur pekerjaan, padahal kan ada beberapa dinas yang memang memiliki kewajiban juga dalam pencegahan stunting, tapi seakan upaya pencegahan stunting menjadi satu-satunya tanggungjawab Dinas Kesehatan” (wawancara, 08 Agustus 2023).

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang mengemukakan bahwa, himbauan bupati Aceh Barat untuk bersama-sama memerangi stunting menjadi tanggungjawab bersama, termasuk dinas-dinas terkait yang diberikan anggaran untuk membuat program pencegahan dan penanganan stunting, bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja.

PENUTUP

Sebagai upaya dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 320 Tahun 2023 membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pembentukan tim ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan seluruh komponen terkait, dalam hal penanganan stunting, sekaligus menjadi langkah dalam menentukan arah kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun upaya strategis yang dilakukan dalam mencapai tujuan penurunan prevalensi stunting dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi target audiens yang memprioritaskan pada 40 lokasi fokus intervensi, penentuan kelompok prioritas yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu balita, anak balita, dan keluarga balita. Selanjutnya dengan melaksanakan berbagai program preventif seperti pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada desa yang menjadi lokus penanganan, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (DASHAT) dan Rumah Gizi Gampong (RGG). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kemenag Aceh Barat khususnya dengan melibatkan KUA Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin bersama tim pendamping keluarga yang telah dibentuk. Program selanjutnya dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu sebagai fasilitator penyampai informasi kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar Meulaboh selaku penyumbang dana kegiatan penelitian melalui Hibah Internal Penelitian Asisten Ahli sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan terutama kepada pihak Dinas Kesehatan Aceh Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan informan-informan lainnya yang telah bekerjasama dengan baik dan kooperatif, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.

Bensley, R. J., & Brookins-Fisher, J. (2013). *Community Health Education Methods*. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, Inc.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Ester, Mourao Correa., Caroline de Oliveira Gallo., Jose Leopoldo Ferreira Antunes., & Patricia Constante Jaime. (2023). The Tendency of Stunting Among Children Under Five in The Northern Region Of Brazil, According To The Food And Nutrition Surveillance System, 2008-2017. *Journal de Prediatria*, 99(2): 120-126.

Ernawati, A. (2022). Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 18(2): 139-152.

Hardani, S.Pd., M.Si., D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. GP Press.

Isobel L. Gabain, Anouschka S. Ramsteijn, and Joanne P. Webst. (2022). Parasites and Childhood Stunting a Mechanistic Interplay With Nutrition, Anaemia, Gut Health, Microbiota, And Epigenetics. *Trends in Parasitology*, 6(2): 167-180.

Kementerian Kesehatan. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta, Indonesia.

Kementerian Kesehatan. (2022). *Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 (Edisi 1)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Liliweri, Alo., (2007). *Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marni, Andi Zulkifli Abdullah., Ridwan M Tha., Helathy Widayanti., Saifuddin Sirajuddin., & Muh Syafar. (2021). Risk Factor and Interventions of Behavioral Changing Strategy in Acceleration Of Stunting Prevention: A Systematic

- Review. *Enfermería Clínica*, 31(5): 636-639.
- Mukti, S., Purnama, A., Ridha, A. R., & Petroza, R. (2022). Analisis Komunikasi Kesehatan Terkait Keberhasilan Pencegahan Stunting Anak di Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7): 9357-9368.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Pratiwi, Soraya Ratna. (2019). Manajemen kampanye komunikasi kesehatan dalam upaya pengurangan prevalensi balita stunting. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(1): 1-23.
- Raco, J. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Grasindo.
- Rini Archda Saputri. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2):152-168.
- Rizki Irwan., & Faustyna. (2023). Health Communication Strategies In Excelling The Decrease Of Stunting Conditions In Children In Lubuk Pakam Deli Serdang. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 2(1): 81-86.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. 154.
- Turnip, S. (2018). Narration in Health Communication for Stunting. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(4): 248-256.
- UNICEF. (2012). *World Health Organization, The World Bank, Joint child Malnutrition estimates: Levels & trends in child malnutrition Africa*. pp. 35.